

POLA INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA¹

(Studi Kasus di Desa Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Oleh : Jemmy R. Mocodompis²

ABSTRAK

Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu tugas pokok pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu contoh pelaksanaan hal tersebut di desa Pokol yaitu melaksanakan rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa Pokol bersama Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat desa Pokol yang di dalam pelaksanaannya memerlukan interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat desa. Berdasarkan observasi awal di Desa Pokol, pelaksanaan isi PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 di Desa Pokol belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana tidak berjalannya proses interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menciptakan pola interaksi sosial yang mendalam sehingga nantinya akan dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini akan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan pembangunan desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pola interaksi sosial yang terjadi di desa Pokol. Penentuan informan di pilih sesuai dengan fokus yang akan di bahas dalam penelitian ini. Kriteria penentuan informan adalah informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian yang ada. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau yang disebut dengan pola wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat desa Pokol pada umumnya sudah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa hambatan yang membuat tidak berjalannya interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat desa Pokol. Untuk kemajuan bersama di kemudian hari, ada baiknya hambatan yang ditemukan ini segera di tangani agar interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat desa Pokol berjalan dengan lancar sehingga melalui interaksi sosial yang terjadi, pelaksanaan pemerintahan desa Pokol mampu di tingkatkan karena adanya dukungan dari semua pihak.

Kata Kunci : Interaksi Sosial, Pemerintahan Desa

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat pedesaan disatu pihak dan dilain pihak diperlukan peran aparat pemerintah desa khususnya kepala desa beserta perangkatnya (Widjaya, 2008: 23). Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu tugas pokok pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu contoh pelaksanaan hal tersebut di desa Pokol yaitu melaksanakan rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa Pokol bersama Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Peremberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat desa Pokol.

Bila dilihat dari tugas yang di emban oleh pemerintah desa tentunya cukup kompleks dan memerlukan penanganan yang serius serta memerlukan kerjasama yang baik dan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Kerjasama sebagai suatu proses merupakan bentuk interaksi yang pokok dan merupakan proses yang utama di katakan demikian karena segala macam interaksi dapat dikembalikan pada kerjasama. Kerjasama yang baik dapat tercipta manakala antara pemerintah desa dan masyarakat desa akan terjadi kontak dan komunikasi yang harmonis. Kontak dan komunikasi merupakan pola umum yang terjadi dalam diri manusia yang turut mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan. Bila hal ini dihubungkan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kontak dan komunikasi menjadi prasyarat utama dalam membangun hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Proses kontak dan komunikasi ini dapat dilihat dalam PP No. 43 tahun 2014 Bab VII tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dimana perencanaan pembangunan desa di susun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa khususnya perencanaan pembangunan desa perlu di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Kenyataannya isi PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana yang dikemukakan khususnya di Desa Pokol belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh yang paling praktis adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANG) tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana proses pengusulan proyek harus diketahui oleh masyarakat luas dan cara pengusulannya harus melalui proses urung rembuk yang dilaksanakan dari tingkat dusun. Kenyataannya cara yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa khususnya kepala desa dalam proses perencanaan pembangunan desa masih bersifat top down padahal dalam mekanisme perencanaan pembangunan desa memerlukan bentuk dan pola sinergitas dengan proses kontak dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Hasil observasi awal menunjukkan tidak berjalannya proses interaksi sosial yakni melalui kontak dan komunikasi secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang maksimal dan melemahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pola interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi akan sangat diperlukan untuk membangun kemitraan/hubungan yang harmonis antara aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Alasan itulah yang mendasari penulis untuk mengambil pokok bahasan penelitian dengan

menitikberatkan pada: “Pola Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menunjang Pemerintahan Desa (studi kasus di Desa Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Soekanto (2002 : 15) interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok – kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok – kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota – anggotanya. Interaksi sosial antara kelompok – kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih dominan di lihat apabila terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak – pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem sosial sebagai akibat hubungan termaksud.

Homans (Soekanto, 2002: 15) mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus atau perangsang bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Hamdi (2004) memberikan pengertian tentang interaksi sosial adalah merupakan proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ahli psikologi lainnya Gerungan (2003 : 31) menyatakan interaksi sosial adalah merupakan hubungan antara dua atau lebih individu, manusia, dimana kelakuan individu yang satu mengubah atau mempengaruhi kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Kelangsungan interaksi sosial sekalipun dalam bentuk yang sederhana, ternyata merupakan proses yang kompleks.

Pendapat lain dikemukakan oleh Shaw (2010 : 46) dimana interaksi sosial adalah suatu pertukaran antar pribadi yang masing – masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain. Hal senada juga dikemukakan Thibaut dan Kelley (2008 : 65) bahwa interaksi sosial sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu yang lainnya.

Bentuk – bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian. Charles H. Cooley (dalam Soekanto, 2006:66) mengatakan betapa pentingnya kerjasama, dan kerja sama timbul apabila ada kesadaran bahwa orang tersebut mempunyai kepentingan – kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pendidikan terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan – kepentingan tersebut.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat pedesaan di satu pihak dan di lain pihak diperlukan peran aparat pemerintah desa khususnya kepala desa berserta perangkatnya (Widjaya, 2008: 23). Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu tugas pokok pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu contoh pelaksanaan hal tersebut di desa Pokol yaitu melaksanakan rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa Pokol bersama Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Peremberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat desa Pokol.

Bila dilihat dari tugas yang di emban oleh pemerintah desa tentunya cukup kompleks dan memerlukan penanganan yang serius serta memerlukan kerjasama yang baik dan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Kerjasama sebagai suatu proses merupakan bentuk interaksi yang pokok dan merupakan proses yang utama di katakan demikian karena segala macam interaksi dapat dikembalikan pada kerjasama. Kerjasama yang baik dapat tercipta manakala antara pemerintah desa dan masyarakat desa akan terjadi kontak dan komunikasi yang harmonis. Kontak dan komunikasi merupakan pola umum yang terjadi dalam diri manusia yang turut mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan. Bila hal ini dihubungkan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kontak dan komunikasi menjadi prasyarat utama dalam membangun hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Proses kontak dan komunikasi ini dapat dilihat dalam PP No. 43 tahun 2014 Bab VII tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dimana perencanaan pembangunan desa di susun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa khususnya perencanaan pembangunan desa perlu di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Kenyataannya isi PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana yang dikemukakan khususnya di Desa Pokol belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh yang paling praktis adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANG) tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana proses pengusulan proyek harus diketahui oleh masyarakat luas dan cara pengusulannya harus melalui proses urung rembuk yang dilaksanakan dari tingkat dusun. Kenyataannya cara yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa khususnya kepala desa dalam proses perencanaan pembangunan desa masih bersifat top down padahal dalam mekanisme perencanaan pembangunan desa memerlukan bentuk dan pola sinergitas dengan proses kontak dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Hasil observasi awal menunjukkan tidak berjalannya proses interaksi sosial yakni melalui kontak dan komunikasi secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang maksimal dan melemahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pola interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi akan sangat diperlukan untuk membangun kemitraan/hubungan yang harmonis antara aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Alasan itulah yang mendasari penulis untuk mengambil pokok bahasan penelitian dengan menitikberatkan pada pola interaksi sosial masyarakat dalam menunjang pemerintahan desa (studi kasus di Desa Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Pola interaksi sosial masyarakat desa mampu menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan desa seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pokol Kecamatan Tamako.

METODE PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pola interaksi sosial masyarakat desa dengan tingkat pelaksanaan pemerintahan desa seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta ingin mengetahui pola interaksi sosial melalui hubungan kerjasama dalam kaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menciptakan pola interaksi sosial yang mendalam sehingga nantinya akan dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini akan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan pembangunan. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sumbangan nyata ilmu pemerintahan dalam kaitan dengan pola interaksi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004: 63) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2002 : 38).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empiric dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data – data deskriptif berupa kata – kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya. Karena penelitian ini lebih bersifat kualitatif, maka penentuan cara untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat, maka dibutuhkan berbagai informasi penting yakni melalui informan. Melalui informan penulis akan dapat mewawancarai secara mendalam dari sumber informan kunci yang dianggap mampu memberikan keterangan dan informasi yang berkaitan dengan pola interaksi sosial masyarakat desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa khususnya di Desa Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe. Penentuan informan akan dipilih sesuai dengan fokus yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Kriteria penentuan informan adalah informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian yang ada seperti kepala desa Pokol, sekretaris desa Pokol, kepala urusan desa Pokol, ketua BPD Pokol, sekretaris BPD Pokol, tokoh masyarakat desa Pokol dan anggota masyarakat desa Pokol. Fokus penelitian ini adalah pola interaksi sosial masyarakat dengan pelaksanaan tugas pemerintahan desa yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Contohnya melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa Pokol bersama Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat desa Pokol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau yang disebut dengan pola wawancara. Pola wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Terstruktur artinya penulis berpatokan pada pertanyaan yang diarahkan melalui para peneliti dan

diarahkan fokusnya. Sedangkan tidak terstruktur artinya mencoba memahami latar belakang terdalam yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi diadakan secara partisipatif, dimana peneliti akan langsung membaur dengan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (Supargoyo, 2002 : 36) tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Oleh karena itu data kualitatif yang dikumpulkan akan di analisis dengan menggunakan penjelasan kualitatif. Dalam analisis ini, apa yang ditemukan tidak hanya cukup dijelaskan dengan apa adanya tetapi penulis juga menginterpretasikannya. Sebagaimana layaknya dalam penelitian sosial maka data dapat dideskripsikan, diinterpretasikan dan diverifikasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Kabupaten Kepulauan Sangehe adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia yang terletak pada posisi 2° 4'13"-04° 44'22" LU dan 125° 56'57" BT. Berada antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Republik Pilipina) dan merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara. Secara keseluruhan luas wilayahnya mencapai 11.863,58 km² yang terdiri dari daratan seluas 736,98 km² atau 6,2 % (60 % dataran, 40 % lereng) dan lautan seluas 11.126,61 km².

Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Talaud pada tahun 2000. Pada tahun 2007, sebagian wilayah Kabupaten Sangehe dimekarkan menjadi kabupaten baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007, yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau disingkat Kabupaten Sitaro yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007.

Kecamatan Tamako merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi utara. Kecamatan Tamako berjarak 158,07 Mil Laut dari Ibukota Provinsi dan 32 Km dari Ibukota Kabupaten. Berdasarkan topografi kemiringan tanah, 75% letak desa di wilayah Kecamatan Tamako adalah lereng, 30% lembah dan 5% daratan. Kecamatan Tamako terdiri dari 20 desa dengan luas wilayah sebesar 148,26 Km².

Desa Pokol merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tamako. Luas wilayah desa Pokol adalah 400 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 808 jiwa yang terdiri dari 397 orang laki – laki dan 411 orang perempuan.

2. Sejarah Desa Pokol

Tamako merupakan sebuah wilayah dusun (*Beo''e*) sebelum tahun 1800 yang di pimpin oleh seorang kepala dusun di bawah kerajaan Siau. Tahun 1800 Kerajaan Siau pada masa pemerintahan Belanda, dusun Tamako di naikkan statusnya menjadi wilayah desa sekaligus menetapkan Kiet Gula sebagai Kapten Laut (Kapitalaung). Tahun 1948 Desa Tamako dinaikkan statusnya menjadi wilayah kejuguguan dan menetapkan J. P. Takahopekang sebagai *jogugu*. Dengan ditetapkannya Tamako sebagai wilayah kejuguguan, desa Tamako dihapuskan lalu diganti dengan desa *Pokol* terhitung tahun 1848 dan mengangkat kembali Don A. G. Makagiansar sebagai Kapiten Laut

(Kapitalaung). Don A. G. Makagiansar adalah kapiten laut Tamako periode 1845 – 1848.

Wilayah Desa Pokol dulunya adalah seluas wilayah Tamako yaitu dari desa Lebo sampai desa Kalinda. Itulah sebabnya sampai sekarang ini di desa Lebo dan desa Kalinda ada tempat bernama *Pokole*, kedua tempat itu merupakan batas wilayah desa Pokol pada saat itu. Dengan wilayah yang sangat luas maka nama yang dimunculkan oleh Tokoh Adat / masyarakat Tamako sebagai pengganti nama desa Tamako adalah *Dokole*, orang Belanda menyebutnya *Vocol* yang artinya besar. Selanjutnya *Dokole* disebut *Pokole* sehingga menjadi desa *Pokole (Pokol)* yang artinya wilayah desa yang sangat luas.

Pelaksanaan pemerintahan semakin hari semakin berkembang dan sasarannya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh kerajaan Siau pada masa pemerintahan Belanda, desa Pokol mengalami pemekaran seperti terbentuknya desa Balane dan desa Menggawa. Pada tahun 1910 kejuguguan Tamako diserahkan oleh kerajaan Siau kepada kerajaan Manganitu, sehingga kerajaan Manganitu menjadi dua wilayah kejuguguan yaitu Manganitu dan Tamako. Berdasarkan penyerahan tersebut wilayah desa Pokol dari Lelapide sampai Lebo diserahkan kembali kepada kejuguguan Manganitu dan wilayah desa Pokol dihitung dari Lepapide sampai dengan Kalinda. Setelah tahun 1910, desa Pokol kembali mengalami pemekaran yaitu dengan terbentuknya desa Nagha, Binala dan Kalinda sehingga luas wilayah desa Pokol berbatas dengan desa Nagha di sebelah utara, desa Balane di sebelah timur, desa Menggawa di sebelah selatan dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Pada tahun 2008, desa Pokol mengalami pemekaran kembali dan terbentuklah desa Hesang. Berdasarkan pemekaran tersebut wilayah desa Pokol sejak tahun 2008 hanya berbatas pada wilayah Pusat Pemerintahan Kecamatan Tamako.

3. Sejarah Pemerintahan Desa

No	Periode	Nama Kapitalaung / Kepala Desa
1	1800 - 1830	Kiet Gula
2	1830 - 1845	C. D. Tuwoliu
3	1845 - 1859	Don. A. G. Makagiansar
4	1859 - 1870	Niklas Masoara
5	1870 - 1880	Yohanis Tasalane
6	1880 - 1903	Andreas Papudi
7	1903 - 1906	J. Maniku
8	1906 - 1907	J. Masoara
9	1907 - 1909	Sahibete Owang
10	1909 - 1910	Angkabumi Papudi
11	1910 - 1911	Preman Lahawia
12	1911 - 1913	Philipus Taidi
13	1913 - 1920	Apolos Papudi
14	1920 - 1930	Josepus Mende
15	1930 - 1936	Adrian Bohang
16	1936 - 1945	L. D. Maniku
17	1945 - 1949	Adil Maloringan
18	1949 - 1950	Matheon Ramehiang
19	1950 - 1955	Marthin Maniku
20	1955 - 1960	L. D. Maniku

21	1960 - 1964	G. Maniku
22	1964 - 1965	I. U. Maniku
23	1965 - 1973	A. Megawe
24	1973 - 1975	A. Pelokang
25	1975 - 1977	Spelman Kaloke
26	1977 - 1981	Agustinus Enampato
27	1981 - 2002	F. W. Taidi
28	2002 - 2004	Ester Riangkamang
29	2004 - 2009	J. Garing
30	2009 - sekarang	Meyer J. Maniku

B. Hasil Penelitian

1. Pola Interaksi Sosial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Interaksi sosial akan terjadi apabila manusia dalam hal ini orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pokol (bapak M. M) mengatakan: *Hal yang melatar belakangi pola interaksi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.*

Hasil wawancara dengan seorang anggota masyarakat Desa Pokol (bapak W. B) mengatakan: *Pola interaksi sosial antara masyarakat dan pemerintah desa Pokol berjalan sangat baik karena hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat selalu terbuka, saling membantu dan memperhatikan.*

Interaksi dan pengaruh sosial adalah sentral dari kehidupan bermasyarakat. Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi. Hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Bapak L. H) mengatakan: *Kerjasama sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena tanpa ada kerjasama semua rencana tidak akan berhasil.* Hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan (Bapak P. K) mengatakan: *Kerja sama sudah pasti sangat penting sebab kalau tidak ada kerja sama tidak ada program yang akan jalan untuk itu harus ada penyatuan pemikiran dan tujuan terlebih dahulu.*

Bukti kerjasama antara pemerintah desa Pokol dan masyarakat adalah realisasi program pembangunan di desa Pokol yang sudah berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pokol (Bapak M. M) mengatakan: *Ada beberapa program yang sudah terealisasi 100%, contohnya pembangunan sarana air bersih/MCK, pembangunan talud pengaman pemukiman dan pembangunan jalan rabat beton/jalan setapak, hanya Balai Desa yang realisasinya baru 80%.*

Melalui kerjasama yang merupakan salah satu bentuk interaksi, pemerintah desa Pokol telah menunjukkan bentuk kepeduliannya dalam membangun interaksi dengan masyarakat desa. Hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat desa Pokol (Bapak J. T) mengungkapkan: *Salah satu bentuk kepedulian yang nyata dari pemerintah desa Pokol adalah memberikan pukat sebagai sumbangan dari pemerintah desa untuk masyarakat desa Pokol guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pokol.*

Hasil wawancara dengan Kepala desa Pokol (Bapak M. M) mengatakan: *Sebagai salah satu bentuk kepedulian aparat pemerintah desa dalam membangun interaksi melalui hubungan kerjasama dengan masyarakat desa Pokol adalah selalu di*

libatkannya masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan dalam forum Musrenbang sampai pada tahap pelaksanaan dalam bentuk swadaya atau partisipasi.

Hasil wawancara dengan Kaur Umum (Ibu S.O) menunjukkan bahwa adanya interaksi dalam bentuk hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah di desa Pokol. Kaur Umum (Ibu S. O) mengatakan: *Sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa, masyarakat desa Pokol membuat kegiatan pencarian dana berupa olahraga otak dalam menunjang dana pembangunan Balai Desa yang dilaksanakan di lindungan dua Desa Pokol.*

2. Hambatan Dalam Proses Interaksi Sosial Melalui Kontak dan Komunikasi

Pola interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat desa Pokol melalui kontak dan komunikasi diharapkan agar dapat selalu berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal dapat tercapai. Namun dalam kenyataannya pola interaksi sosial di desa Pokol ini masih menemui hambatan atau kendala yang dihadapi.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang di lakukan di desa Pokol, di temukan beberapa kendala yang dihadapi. Beberapa faktor yang signifikan menyebabkan situasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa.

Setiap keberhasilan pembangunan desa memerlukan peran serta masyarakat, menyadari bahwa kepentingan yang di prioritaskan dalam pembangunan desa adalah kepentingan masyarakat. Namun kenyataannya, masyarakat belum mampu mengartikan maksud pembangunan desa adalah untuk masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat lebih bersikap apatis dan menyerahkan semua masalah pemerintahan kepada pemerintah desa. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pembangunan desa, mengingat posisi masyarakat dalam pembangunan desa sangat strategis, dimana dukungan dan peran aktif masyarakat akan sangat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Terbatasnya alat komunikasi dalam menunjang pelaksanaan proses interaksi sosial.

Komunikasi merupakan landasan interaksi sosial. Terbatasnya alat komunikasi dapat menyebabkan tidak sampainya pesan ke tujuan yang di maksud. Tidak berjalannya komunikasi yang baik akan mempersulit pemerintah dalam merangkul masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Interaksi Sosial Melalui Kontak dan Komunikasi

Pembangunan maupun pengembangan, merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan tertentu yang dianggap kurang dikehendaki menuju ke suatu keadaan tertentu yang dinilai lebih dikehendaki. Bila pemahaman tersebut diaplikasikan di desa, maka pembangunan ataupun pengembangan desa merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju pada suatu kondisi tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan.

Menyadari adanya hambatan dalam pola interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat desa yang dapat mengganggu jalannya pembangunan dan pemerintahan desa, ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang bisa diterapkan untuk menangani hambatan tersebut yaitu :

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan komunikatif.

Banyak yang berpikir bahwa transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak leaflet suatu program dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat, atau “menempelkan” pengumuman pada lokasi yang kurang memungkinkan untuk dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Kondisi masyarakat yang apatis terhadap program – program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya – upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data/informasi pembangunan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka.

Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat desa (Bapak Y. H) adalah: *Perlu diadakan sosialisasi guna menjelaskan tujuan dan maksud kegiatan pembangunan serta manfaat pembangunan tersebut. Jika semuanya dijelaskan kepada masyarakat, maka akan timbul rasa untuk berperan serta dalam pembangunan tersebut.*

2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Komunikasi Sebagai Dasar Interaksi Sosial

Tidak berjalannya proses interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang maksimal dan melemahkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Terbatasnya alat komunikasi merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan tidak berjalannya komunikasi dengan baik. Memaksimalkan komunikasi dapat diartikan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan lagi agar terjadi interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat desa yang pada akhirnya adalah pencapaian tujuan bersama.

C. Pembahasan

1. Pola Interaksi Sosial dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Soekanto (2002 : 15) interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok – kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan untuk menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Bertemunya orang perorangan secara badania belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan semacam ini baru akan terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain-lain sebagainya.

Interaksi sosial antara kelompok – kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota – anggotanya. Interaksi sosial antara kelompok – kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat desa Pokol di dasarkan pada kepentingan bersama yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat desa.

Interaksi sosial merupakan satu paket realitas sosial dengan karakteristik khusus yakni: jumlah pelaku dua orang atau lebih, terjadi komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang, prosesnya akan terjadi dalam suatu dimensi waktu tertentu, dan ada tujuan yang hendak dicapai. Bila hal ini dihubungkan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kontak dan komunikasi menjadi prasyarat

utama dalam membangun hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Charles H. Cooley (dalam Soekanto, 2006:66) mengatakan betapa pentingnya kerjasama, dan kerja sama timbul apabila ada kesadaran bahwa orang tersebut mempunyai kepentingan – kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pendidikan terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan – kepentingan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berujung pada kerjasama di anggap sangat penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa karena dengan adanya kerjasama maka rencana ataupun program pasti akan berhasil. Segala macam interaksi dapat di kembalikan pada kerjasama, baik itu interaksi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dan kelompok.

Pada dasarnya dalam hubungan interaksi sosial, dapat terjadi interaksi positif ataupun negatif. Interaksi positif jika hubungan timbal balik yang terjadi saling menguntungkan. Interaksi negatif jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya (bermusuhan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat desa. Hal tersebut di tandai dengan adanya hubungan timbal balik baik dari pemerintah untuk masyarakat desa maupun dari masyarakat untuk pemerintahan desa.

Hamdi (2004) memberikan pengertian tentang interaksi sosial adalah merupakan proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Terjadinya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah tentunya saling mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berinteraksi sosial dengan pemerintah akan mampu mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemerintahan desa, begitupun sebaliknya.

2. Hambatan Dalam Proses Interaksi Sosial Melalui Kontak dan Komunikasi

Kata komunikasi mengandung pengertian pandangan umum atau adanya konsepsi yang sama tentang sesuatu. Komunikasi adalah landasan dasar dari interaksi sosial. Komunikasi adalah proses dari penerusan dan penerimaan dari stimuli simbolis dengan jalan bercakap – cakap, gerakan – gerakan, dan tanda – tanda lain. Komunikasi itu meliputi pendefinisian yang sama mengenai situasi (*action, actor*, ruang, waktu, norma, nilai) yang belum tentu dapat dimengerti oleh seluruh anggota masyarakat, melainkan hanya oleh kelompok tertentu atau oleh orang – orang dari lapisan tertentu masyarakat.

Komunikasi antara individu – individu itu adalah perlu untuk menyusun organisasi masyarakat. Akan tetapi komunikasi juga mungkin menimbulkan disorganisasi dalam masyarakat. Apabila kontak antara individu atau kelompok menimbulkan pertentangan, maka proses itu dapat disebut konflik. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki keinginan yang tidak terbatas, sehingga konflik dapat sering terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi seperti kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa serta terbatasnya alat komunikasi dalam menunjang pelaksanaan proses interaksi sosial.

Para ahli seperti Maclver, J.L Gillin dan J.P. Gillin sepakat bahwa adanya interaksi karena mempunyai nilai – nilai, norma – norma, cara – cara, dan prosedur yang

merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat isitiadat tertentu (Soelaeman, 2011 : 122). Kesukarannya adalah karena mempunyai pandangan – pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat, sehingga perubahan akan sangat sulit terjadi.

3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Interaksi Sosial Melalui Kontak dan Komunikasi

Bentuk – bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan bahkan juga dapat berbentuk pertentangan. Suatu pertentangan mungkin mendapatkan suatu penyelesaian yang apabila berhasil di atasi akan besar peranannya dalam mencapai tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan komunikatif merupakan solusi yang bisa mengatasi hambatan yang terjadi di desa Pokol.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan desa, peraturan kepala desa serta kebijakan pemerintahan desa dengan biaya yang minimal. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya di miliki pemerintahan desa dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan.

Transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan pemerintahan desa dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Transparansi sendiri tidak mungkin tercipta jika pemerintahan desa tidak bertanggungjawab dan tidak ada jaminan hukum atas hak masyarakat desa untuk mengakses berbagai informasi tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan di desa Pokol akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan lebih aktif berinteraksi sosial melalui hubungan kontak komunikasi bahkan kerjasama dengan pemerintah desa guna menunjang pelaksanaan pemerintahan desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut Soekanto (2002 : 15) interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok – kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.. Interaksi sosial antara kelompok – kelompok manusia terjadi di dalam masyarakat.

Pola interaksi sosial masyarakat di desa Pokol berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya interaksi sosial antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Interaksi sosial antara pemerintah desa dan masyarakat di tandai dengan adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat desa.

Menurut Hamdi (2004) interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi. Adapun solusi yang bisa

dilakukan adalah membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan komunikatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan di desa Pokol akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga mampu menarik daya minat masyarakat untuk turut berperan secara aktif dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan desa Pokol Kecamatan Tamako.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka saran yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah diharapkan kepada Pemerintah Desa Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus mengembangkan tatanan pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab (akuntabel), demokrasi dan terbuka (transparan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamdi, H. 2004. *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Rafika Aditama
- Bintarto, R. 1985. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahan*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Dadang Juliantara, 2005. *Kelembagaan Desa dan Proses Modernisasi*. Jakarta : Gramedia Asri
- Gerungan, W. A. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Eresco Bandung
- J.B.A.F Mayor Polak. 1976. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : PT Gramedia
- HAW Widjaya. 2008. *Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Alex Media Kompuntindo
- Maryati dan Suryawati. 2009. *Psikologi Kepribadian*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mariun. 1969. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : CV Rajawali
- Moleong Lexi, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- New Comb. 2008. *Teori – teori Sosiologi*. Jakarta : Gunung Mulia
- Nugroho Riant. 2005. *Kelembagaan Desa*. Jakarta : Sinas Media Pustaka Rajawali
- P. J. Bouman. 1971. *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta : Budi Mulia
- Shaw. 2010. *Psikologi Sosial*. Bandung : Rosdakarya
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta : CV Rajawali
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soelaeman, M. 2011. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sutarjo Kartohadikusumo. 1975. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta : CV Haji Masagung
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta : CV Rajawali
- Thibaut dan Kelley. 2008. *Teori Sosiologis Edisi Keenam*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tim Sosiologi. 2002. *Bunga Rampai Sosiologi, disadur oleh Rahman Dilgani*. Jakarta : CV Rajawali
- W.I.Thomas. 1967. *Changing Organizations Essay on the Development & Evaluations of Human Organizations*. New York : Mc. Graw Hill Book Company
- Zulkarnain Nasution. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis*. Malang : UMM Press
- Sumber – sumber lain :
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa